

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN WISATA MALINO SEBAGAI " *BEAUTIFUL MALINO*" DI KABUPATEN GOWA

Andi Atrianingsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur
atrianingsi@uit.ac.id

Beddu Lahi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur
beddu.lahi_0901016702@uit.ac.id

Sitti Mirsa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur
sitti.mirsa@uit.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam mengembangkan daerah wisata Malino sebagai destinasi wisata yang populer dengan istilah Beautiful Malino. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam yang dilengkapi dengan metode observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan Malino sebagai daerah wisata di Kabupaten Gowa telah terlaksana dengan baik. Dimana hasil yang dicapai karena pemerintah telah melaksanakan perannya sebagai motivator, fasilitator, dinamisator.

Kata Kunci : Pemerintah, Wisata Malino, Mengembangkan, Beautiful Malino.

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam bidang sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya saat ini, merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sektor*) dalam perekonomian nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari segi aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa, meningkatkan kewirausahaan

nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah.

Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku

pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Kawasan wisata alam Malino merupakan penyumbang PAD terbesar untuk sektor pariwisata di Kabupaten Gowa. Pemasukan terbesar untuk sektor pariwisata di Malino adalah hotel dan penginapan. Sementara obyek wisata lainnya hanya sebagai penopang saja.

Potensi pengembangan sektor pariwisata di Malino mempunyai prospek yang cukup potensial karena mempunyai berbagai jenis obyek wisata seperti wisata alam, wisata tirta, wisata kebun dan ciri khas cendera mata. Agar dapat mengembangkan wisata alam Malino maka pemerintah dipandang perlu memperhatikan sarana dan prasarana pada setiap obyek wisata yang ada di Malino, perbaikan jalan menuju ke lokasi wisata juga perlu menyiapkan berbagai kuliner dan cinderamata khas daerah Malino yang tidak akan didapatkan di daerah manapun.

Malino memang dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan dengan eksotisme alam dataran tinggi serta beraneka ragam flora terdapat disini. Malino juga memiliki air terjun, hutan pinus dan salah satu pusat pelatihan dan pendidikan calon anggota TNI di Sulawesi Selatan. Namun, sebagai salah satu tujuan pariwisata di bagian utara Sulawesi Selatan, akses jalur darat ke Malino selayaknya mendapat perhatian khusus

Pemerintah Sulawesi Selatan maupun pemerintah pusat. Sebab, akses jalur darat menuju Malino sebagian mengalami rusak berat dengan kondisi jalan berlubang dan bergelombang.

Kerusakan jalan menuju Malino tampak dimulai dari Kecamatan Parangloe. Di Kecamatan ini, sejumlah titik jalan mengalami kondisi rusak parah dengan kondisi jalan berlubang dan bergelombang. Meski sebagian jalanan di Kecamatan Parangloe beraspal beton, namun masih ada beberapa titik jalanan yang juga mengalami kerusakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan wisata Malino. Serta apa hambatan pemerintah dalam mengembangkan Malino sebagai daerah wisata Malino.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif-Kualitatif yang merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. (Sugiyono).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan observasi serta melalui data primer dan sekunder.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu dengan cara menghimpun fakta

dan mendiskripsikannya. Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada $12^{\circ}38.16'$ Bujur Timur dari Jakarta dan $5^{\circ}33.6'$ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara $12^{\circ}33.19'$ hingga $13^{\circ}15.17'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}5'$ hingga $5^{\circ}34.7'$ Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan

yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Peta Administrasi Kabupaten Gowa



Gambar 4.1: Peta Administrasi Kabupaten Gowa

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi bendungan DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. Kecamatan Tinggimoncong merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 1050 mdpl yang berbatasan Sebelah Utara Kabupaten Maros, sebelah selatan Kecamatan Parigi, sebelah barat Kecamatan Parangloe, dan Kecamatan Tombolo Pao sebelah timur. Curah hujan rata dalam pertahun antara 135 hari sampai 160 hari. Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 7 (tujuh) desa/kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 2005. Ibu Kota Kecamatan Tinggimoncong adalah Kelurahan Malino dengan jarak sekitar 63 km dari Sungguminasa merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Selatan.

Kecamatan Tinggimoncong memiliki luas wilayah sebesar 142,87 km² dengan topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai.

Kecamatan ini berada di kawasan Gunung Bawakaraeng dan dilalui beberapa alisan sungai. Salah satunya adalah Sungai Jeneberang yang merupakan sungai paling panjang di Kabupaten Gowa dengan luas daerah aliran sungainya mencapai 881 km². Desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah paling luas di Kecamatan Tinggimoncong yaitu Desa Parigi dengan luas 48,94 km² (34,25% dari luas Kecamatan Tinggimoncong). Sementara itu, Desa/kelurahan yang luas wilayahnya paling kecil yaitu Kelurahan Gantarang, dimana luasnya hanya 11,50 km² (8,05% dari luas Kecamatan Tinggimoncong). Mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Karena berada di dataran tinggi, suhu udara rata-rata di daerah ini berkisar antara 18°C - 24°C.

2. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Wisata Malino Sebagai Kota Wisata Kabupaten Gowa

Untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku *regulator* maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis. Pemerintah tentu harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Di sisi lain, pebisnis yang lebih terfokus dan berorientasi keuntungan tentu tidak bisa seenaknya melakukan segala sesuatu demi mencapai keuntungan tetapi harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah.

Adapun tanggapan informan tentang peran pemerintah dalam

mengembangkan wisata Malino sebagai kota wisata Kabupaten Gowa yaitu:

a. Peran Pemerintah Sebagai Motivator

Motivator dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Mengenai peran pemerintah sebagai motivator, berikut tanggapan (YY), Kepala Bidang Destinasi Kepariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa:

“Salah satu bentuk promosi kita adalah pada saat Event Beautiful Malino yang merupakan salah satu ajang promosi kami dimana kami memperlihatkan semua objek yang ada di kawasan Malino”. (Wawancara Rabu, 09 Agustus 2017)

Dalam event Beautiful Malino, ada tujuh item kegiatan yang akan meramaikan Malino seperti sepeda gunung, lari lintas alam, parade bunga, festival musik, bincang budaya, summer camp dan pameran pembangunan.

Bupati Gowa menegaskan bahwa tujuan dari event ini adalah masuk dalam kalender nasional setiap tahun. Selama tiga tahun berturut-turut, event ini akan dilaksanakan.

Pemerintah berharap dengan diadakannya event Beautiful Malino akan meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Gowa.

Tabel 4.4

Target dan nilai pemasukan PAD Kabupaten Gowa 2014-2016

No	Tahun	Target	Pemasukan
1	2014	Rp. 665.000.000	Rp.1.061.096.491
2	2015	Rp.1.165.000.000	Rp.1.741.975.989
3	2016	Rp.1.915.000.000	Rp.2.262.331.775

Sumber : Laporan PAD Kabupaten Gowa

Jika dilihat dari hasil penerimaan PAD Kabupaten Gowa dari tahun 2014 hingga tahun 2016 yang semakin meningkat dan melebihi dari yang ditargetkan, berarti peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata ini sangat berhasil.

b. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah orang yang memberikan fasilitas dalam hal ini Pemerintah sebagai pengembang potensi pariwisata. Dalam hal ini peran pemerintah menyediakan segala fasilitas yang mendukung potensi tersebut. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

Mengenai peran pemerintah sebagai fasilitator, berikut penjelasan (YY), Kepala Bidang Destinasi Kepariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa:

“Dilihat dari sarana dan prasarannya pada tahun 2017 kita dapat bantuan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) diperuntukkan dalam kawasan Hutan Wisata Malino. Disana ada pembuatan 1 unit toilet kering, pemasangan lampu taman sekitar 150 unit, pembangunan kios cendera mata 1 unit dan pembuatan pergola 10 unit” (Wawancara Rabu, 09 Agustus 2017)

Pergola adalah salah satu sarana untuk berteduh atau beristirahat sembari menikmati suasana di Hutan Wisata Malino. Semua sarana itu bersumber dari DAK. Dana dari APBD tahun 2017 belum dianggarkan terkecuali pembinaan ke kawasan Malino. Menurut informan lain (HR), pengunjung Air Terjun Takapala:

“Di kawasan Air Terjun ini juga butuh perhatian dari pemerintah, fasilitas disini masih kurang memadai dan ada beberapa fasilitas yang butuh diperbaiki. Disini juga tidak ada tempat pembuangan sampah, tangga-tangganya juga sudah rusak. Ada baiknya kalau disini juga dilengkapi fasilitasnya jangan cuma yang di kawasan Hutan Wisata Malino saja”. (Wawancara Jumat, 24 Maret 2017)

Dari pernyataan beberapa informan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah memang sudah membangun fasilitas namun belum menyeluruh, pemerintah hanya menyediakan fasilitas di beberapa obyek saja.

c. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Dinamisator dalam keberlangsungan pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu pemegang kekuasaan pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata. Berikut tanggapan (YY), Kepala Bidang Destinasi Kepariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa mengenai bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat:

“Bentuk kerjasama pemerintah kepada masyarakat yah masih sekedar pembinaan saja” (Wawancara Rabu, 09 Agustus 2017).

Kepala Bidang Destinasi Kepariwisata Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa juga menjelaskan bentuk kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta adalah:

“Bentuk kerja sama pemerintah dan pihak swasta yah salah satunya adalah Malino Highlands itu. Kita Cuma sekedar monitoring saja kebawah dan mengevaluasi hotel-hotel dan rumah makan yang ada disana”. (Wawancara Rabu, 09 Agustus 2017)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa dalam rangka menjalankan peran dinamisator adalah melakukan monitoring wisata milik swasta. Selain melakukan monitoring terhadap wisata milik swasta di Malino, pihak dinas pariwisata juga mengevaluasi Hotel-hotel dan rumah makan yang ada di Malino.

Pengembangan pariwisata Malino didukung dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak swasta dan pihak pemerintah. Beberapa pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten gowa adalah Malino Highlands dimana Malino Highlands ini dilengkapi dengan hotel dan restoran, di Malino juga terdapat kebun teh dan strawberry milik swasta.

3. Faktor Pendukung Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Wisata Malino Sebagai Kota Wisata Kabupaten Gowa. Saat ini diharapkan sektor pariwisata dapat berkembang dengan baik dan optimal, sudah tentu

perlu didukung oleh berbagai faktor atau komponen yang secara langsung maupun yang tidak berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan.

a. Dukungan Dari Stakeholder

Faktor yang mendukung peran pemerintah dalam mengembangkan obyek wisata adalah dukungan dari stakeholder seperti pihak bandara dan asosiasi tarvel seperti PHRI "Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia". Dukungan dari pihak bandara menurut (RW), sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa:

"Pihak bandara sangat mendukung peran kami dalam mengembangkan suatu obyek wisata, biasanya pihak bandara mengadakan promosi paket wisata murah. Tujuan dari promosi pariwisata yang diadakan oleh pihak bandara ialah agar para wisatawan semakin tertarik untuk berkunjung ke obyek wisata tersebut." (Wawancara Jumat, 21 April 2017).

Paket wisata ini tentu saja diharapkan semakin mendongkrak kunjungan wisata. Menurut (AW), pengunjung Hutan Wisata Malino:

"Menegenai promosi paket wisata murah, sebenarnya ini sangat mendukung dalam meningkatkan jumlah wisatawan apalagi kalau yang dinamakan murah, pasti sangat banyak orang yang berminat untuk melakukan perjalanan wisata." (Wawancara Minggu, 16 April 2017)

Pemerintah juga mendapat dukungan dari Asosiasi Travel yaitu PHRI,

penjelasan (RW), sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa mengenai PHRI ialah:

"PHRI berperan penting dalam memberikan izin jasa perhotelan dan jasa makanan dan minuman, PHRI juga sebagai mitra pemerintah yang mengutamakan kegiatan dibidang industri kepariwisataan." (Wawancara Jumat, 21 April 2017)

Menurut (HR), pengunjung Air Terjun Takapala:

"Berkunjung ke obyek wisata yang ada di Malino sangat menyenangkan, selain kita bisa menjumpai makanan khas Malino, disini juga ada banyak hotel/penginapan dan juga tempat makan sehingga bisa mempermudah para pengunjung yang ingin tinggal beberapa hari di Malino." (Wawancara Sabtu, 25 Maret 2017).

Dilihat dari tanggapan informan diatas mengenai banyaknya hotel dan segala kebutuhan wisatawan. Tempat makan di Malino dapat disimpulkan bahwa semua hal inilah yang mempermudah para wisatawan apabila berkunjung ke Malino dan pemerintah juga sudah menjalankan perannya dengan baik untuk memenuhi sarana dan prasarana tempat wisata tersebut.

b. Keamanan

Keamanan merupakan hal penting yang tidak dapat ditawar. Untuk memajukan keamanan disuatu tempat, sebenarnya hal yang memang harus menjadi perhatian kita semua mengenai attitude atau sifat masyarakat setempat. Mengenai keamanan di kawasan wisata Malino, Kepala Bidang Destinasi Kepariwisataan mengatakan:

“Kalau pendukung dari masyarakat yah responnya cukup bagus dan masalah keamanannya juga bagus”. (Wawancara Rabu, 09 Agustus.

Menurut informan lain, (KA), Sekretaris Camat Tinggimoncong:

“Secara tidak langsung kami memiliki peran dalam keamanan kawasan wisata Malino, contohnya ada masalah-masalah yang terjadi di sekitar obyek wisata seperti terjadi longsor atau terjadi kerusakan masyarakat, kami selaku pemerintah disini pasti akan mengatasinya karena ini sudah tanggung jawab kami.” (Wawancara Senin, 13 Maret 2017)

Dilihat dari tanggapan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama antara Dinas Pariwisata dengan Pemerintah dan Masyarakat Malino ini sudah cukup bagus dalam hal keamanan dikawasan wisata Malino.

4. Faktor Penghambat

a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata merupakan kendala. Sebab banyak rencana pengembangan yang gagal karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat akibat rendahnya kesadaran tersebut.

Menurut (RW), Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa:

“Salah satu Faktor penghambat dalam mengembangkan suatu obyek wisata ialah rendahnya kesadaran masyarakat, contohnya ada beberapa masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan

lingkungan obyek wisata”. (Wawancara Jumat, 21 April 2017)

Kepala Bidang Destinasi Kepariwisata juga mengatakan bahwa:

“Kita menginginkan keterlibatan masyarakat terutama disegi kebersihan, masyarakat belum terlalu menyadari pentingnya kebersihan pada saat kunjungan wisata dan pemahaman tentang informasi juga masih kurang”. (Wawancara Rabu, 09 Agustus 2017)

Jika dilihat dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jika hanya dengan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat itu masih kurang berhasil, pemerintah masih membutuhkan cara lain agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dikawasan wisata itu sangat dibutuhkan

b) Akses Jalan

Guna menunjang sektor pariwisata, sejumlah perbaikan dan pemba ngunan infrastruktur mutlak diperlukan. Infrastruktur jalan perlu diperbaiki, karena banyak jalan menuju lokasi infrastruktur berkondisi buruk.

Kepala Bidang Destinasi Kepariwisata mengatakan:

“Kita kurang dari segi akses jalan menuju Malino, karena banyak kendaraan yang melebihi dari kapasitas muatan sehingga tidak seimbang dengan kualitas jalan. Mungkin jalannya sudah diprediksi sampai 5 tahun atau 10 tahun tapi pada saat itu belum sampai jalannya sudah rusak”. (Wawancara Rabu, 09 Agustus 2017)

Pendapat informan lain, (IW), pengunjung hutan wisata Malino:

"Jalan menuju keMalino itu sangat parah, ada banyak jalan yang berlubang dan bergelombang. Yang paling parah itu di daerah Kecamatan Parangloe dan disana juga ada banyak mobil Truk pengangkut pasir yang juga menyebabkan debu dan kadang juga ada material pasir yang jatuh keaspal jadi kita harus berhati-hati". (Wawancara Sabtu, 15 April 2017)

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam hal infrastruktur jalan ini masih belum terlaksana dengan baik disebabkan karena kapasitas muatan kendaraan yang tidak sebanding dengan kualitas jalan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melihat dari hasil penelitian yang telah di bahas sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Wisata Malino sebagai Kota Wisata Kabupaten Gowa, yaitu:
 - a. Motivator
Peran Pemerintah sejauh ini sudah terlaksana dengan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Hal ini dibuktikan dengan melihat pemasukan PAD di Kabupaten Gowa. Malino termasuk penyumbang terbesar untuk sektor pariwisata Kabupaten Gowa.
 - b. Fasilitator

Peran Pemerintah dalam mengembangkan wisata Malino sebagai penyedia fasilitas sudah menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang pengembangan pariwisata.

- c. Dinamisator

Peran pemerintah dalam mengembangkan wisata Malino sebagai penggerak sudah dipastikan tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta karena penyumbang PAD terbesar di Malino adalah hotel dan penginapan yang merupakan milik swasta.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Wisata Malino Sebagai Kota Wisata Kabupaten Gowa

- a. Faktor yang mendukung peran pemerintah adalah dukungan dari stakeholder seperti pihak bandara dan asosiasi travel seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) yang berperan penting dalam memberikan izin perhotelan dan jasa makanan dan minuman. PHRI juga sebagai mitra pemerintah yang mengutamakan kegiatan dibidang industri kepariwisataan. Bentuk kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan Pemerintah dan Masyarakat Malino juga sudah cukup bagus dalam hal keamanan dikawasan wisata Malino.
- b. Faktor yang menghambat Peran Pemerintah adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Akses jalan yang mengalami kerusakan menuju kawasan obyek wisata Malino juga menjadi kendala terbesar dalam pengembangan wisata di Malino dan

potensi kerusakan jalan ini disebabkan oleh kendaraan-kendaraan yang memiliki kapasitas muatan melebihi dari kualitas jalannya.

Saran

1. Perlunya pemerintah membangun fasilitas penunjang sarana dan prasarana di semua obyek wisata terutama obyek-obyek yang ramai didatangi pengunjung.
2. Sebaiknya pemerintah membangun jalur tersendiri untuk akses jalan menuju Malino bagi kendaraan yang memiliki tonase muatan yang berlebihan seperti truk pengangkut material timbunan dan juga akan mengurangi angka kecelakaan.
3. Masyarakat yang berkunjung ke obyek wisata diharapkan dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan obyek wisata yang ia kunjungi.

REFERENSI

A. Buku

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Damanik, Janinton dan Weber, Helmut F. 2006. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

E. St. Harap, Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bandung* Balai Pustaka

Kansil, C.S.T dan Kansil, S.T. Christine. 2008. *Sistem Pemerintahan*

Indonesia. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.

Marpaung, H. 2002. *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung: Alfabeta.

Mulyana, Deddy dan Solatun. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.

Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Gayatri, P G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Raharjo, Saptano. *Undang-Undang Otonomi Daerah Edisi Terbaru*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Rasyid, Ryaas. 2011. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, BPFE. Yogyakarta.

Sammeng, Andi Mappi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

_____. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sumaryadi, Nyoman, I, 2013. *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit Ghaka indonesia

Syafiie, Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Yoeti, Oka A. Pariwisata Dan Lingkungan Hidup. Bandung: Penerbit Angkasa.

Yoeti, A, Oka. Edisi Revisi, 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Angkasa, Bandung.

Yoeti, A, Oka. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

B. Dokumen Lain

Perda Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Aturan Tentang Pengembangan Pariwisata. Diakses 18 Desember 2016, dari <https://www.google.co.id/m?&q=aturan+tentang+pengembangan+pariwisata>

Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengembangkan pariwisata. Diakses 26 Januari 2017,

<https://www.google.co.id/m?&q=pengan+dan+tanggungjawab+pemerintah+dalam+mengembangkan+pariwisata/>

Potensi dan kendala pembangunan pariwisata. Diakses 28 Desember 2016, dari <https://www.google.co.id/m?&q=potensi+dan+kendala+pembangunan+pariwisata/>

Swarbrooke, pengertian pengembangan pariwisata. Diakses 28 Desember 2016, dari <https://www.google.co.id/url?q=http://karyatulisilmiah.com/pengembangan-pariwisata/>

Website Kabupaten Gowa. Diakses 16 Januari 2017, dari <https://gowakab.co.id/kategori/bank-data/>

Mengenal Stakeholders Pariwisata. Diakses 26 Juli 2017, dari <https://jalatundablog.wordpress.com/2017/01/20/first-blog-post/>

Keterkaitan Infrastruktur pada Pengembangan Pariwisata. Diakses 13 Agustus 2017, dari <https://ideecantik.blogspot.ae/2015/05/keterkaitan-infrastruktur-pada.html?m=1/>

Keamanan, Faktor Penting Yang Menunjang Pariwisata. Diakses 13 Agustus 2017, dari <https://alone2000.blogspot.ae/2011/01/keamanan-faktor-penting-yang-menunjang.html?m=/>



Jurnal Ilmiah Paranata Edu
Volume 1 No 1, Maret 2019

ISSN: 2656-6788